

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA STUDI KUALITATIF BERBASIS DATA SEKUNDER

Khadijah¹

dhija@uis.ac.id

¹Universitas Ibnu Sina

Ayu Mariani²

231062201055@uis.ac.id

² Universitas Ibnu Sina

Maizar³

maizar@uis.ac.id

³ Universitas Ibnu Sina

Dewi Permata Sari⁴

dewi.permata.sari@uis.ac.id

⁴ Universitas Ibnu Sina

Lukman Hakim⁵

lukman.hakim@uis.ac.id

⁵ Universitas Ibnu Sina

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia yang memiliki konsekuensi fiskal dan tata kelola yang besar. Besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat menjadikan transparansi dan akuntabilitas penting dalam memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Program MBG di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari regulasi, dokumen anggaran, publikasi Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, artikel jurnal ilmiah, dan sumber resmi lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas MBG telah diperkuat melalui regulasi, mekanisme pelaporan, digitalisasi penyaluran dana, penggunaan virtual account pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta monitoring dan pengawasan. Namun, kompleksitas program, besarnya anggaran, luasnya jaringan pelaksana, dan kebutuhan integrasi data masih menjadi tantangan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan keterbukaan informasi, integrasi sistem digital, standarisasi pelaporan, pengawasan, dan partisipasi publik diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan MBG.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Data Sekunder, Makan Bergizi Gratis, Pengelolaan Keuangan Publik, Transparansi

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals (Makan Bergizi Gratis/MBG) Program is one of the Indonesian government's strategic programs with significant fiscal and governance implications. Its substantial budget and broad coverage of beneficiaries make transparency and accountability essential to ensure effective, efficient, and accountable financial management. This study aims to analyze transparency and accountability in the financial management of the MBG Program in Indonesia. The study employs a descriptive qualitative approach using secondary data obtained from regulations, budget documents, publications of the National Nutrition Agency (Badan Gizi Nasional), the Ministry of Finance, academic journal articles, and other official sources. Data were analyzed through data reduction, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that transparency and accountability in the MBG Program have been strengthened through regulations, reporting mechanisms, digital fund disbursement, the use of virtual accounts for Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG), as well as monitoring and supervision. However, program complexity, the substantial budget, the extensive implementation network, and the need for data integration remain challenges. The study concludes that strengthening information disclosure, digital system integration, reporting standardization, supervision, and public participation is necessary to improve financial accountability in the MBG Program..

Keywords: *Transparency, Accountability, Public Financial Management, Free Nutritious Meals, Secondary Data*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada bagaimana sumber daya negara dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya negara. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang relevan mengenai proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pemerintah dan pelaksana program untuk mempertanggungjawabkan keputusan serta hasil yang dicapai (Siahay, 2023).

Kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting dalam program pemerintah yang memiliki skala anggaran besar dan cakupan penerima manfaat yang luas. Salah satu program tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai kebijakan strategis untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional dengan melibatkan berbagai kelompok penerima manfaat dan jaringan pelaksana yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Hadinata, 2026. Rohmah et al., 2026).

Secara kelembagaan, pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun, 2024). BGN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Penguatan tata kelola kemudian dilakukan melalui Peraturan (Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut menjadi landasan penting karena tidak hanya mengatur penyelenggaraan MBG, tetapi juga pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa.

Dari sisi anggaran, skala program MBG menunjukkan besarnya tanggung jawab pemerintah dalam mengelola dana publik. Dalam RAPBN 2026, pemerintah merencanakan anggaran MBG melalui kementerian/lembaga sebesar Rp268 triliun, sementara kebutuhan untuk mencapai target 82,9 juta peserta diperkirakan sebesar Rp335 triliun. (Kementerian

Keuangan Republik Indonesia, 2025) Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya dapat dilihat dari jumlah makanan yang didistribusikan atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pengelolaan keuangannya. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan, memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, serta dapat ditelusuri dari proses penganggaran sampai dengan realisasi program (Bening Tirta Wibowo et al., 2026).

Perkembangan pelaksanaan program juga menunjukkan skala yang semakin besar. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sampai dengan 28 Februari 2026 realisasi MBG mencapai Rp44 triliun dan telah menjangkau 61,62 juta penerima melalui 25.082 SPPG. Sementara itu, BGN menyebut bahwa sampai 24 Mei 2026 program telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG (Badan Gizi Nasional, 2026. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2026) Peningkatan skala tersebut secara bersamaan meningkatkan kompleksitas pengelolaan. Program melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, SPPG, pemasok, tenaga kerja, sekolah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dana dan semakin luas jaringan pelaksana, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengendalian, pelaporan, dan pengawasan yang mampu menghasilkan informasi yang dapat dipercaya (Bening Tirta Wibowo et al., 2026).

Dalam konteks tersebut, pemerintah telah mengembangkan mekanisme digital dalam pengelolaan dana MBG. BGN menerapkan penggunaan virtual account bagi SPPG sebagai salah satu mekanisme untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Setiap SPPG memiliki rekening/virtual account khusus yang digunakan untuk operasional program sehingga transaksi dapat lebih mudah ditelusuri dan dipantau. Selain itu, dokumen pemerintah menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola, percepatan pencairan dana, pengembangan aplikasi pemantauan logistik, komunikasi dan partisipasi publik, serta penguatan kemitraan merupakan bagian dari arah kebijakan MBG (Badan Gizi Nasional, 2026b). Meskipun demikian, keberadaan regulasi dan sistem digital belum secara otomatis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah berjalan secara optimal. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga menyangkut kualitas, kelengkapan, keterbaruan, aksesibilitas, dan keterpahaman informasi bagi masyarakat. Demikian pula, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan tersedianya laporan, tetapi juga kemampuan untuk menjelaskan penggunaan sumber daya, pencapaian hasil, serta menindaklanjuti apabila terjadi penyimpangan.

Penelitian terdahulu mengenai transparansi dan pengawasan keuangan negara dalam implementasi MBG menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penguatan tata kelola melalui mekanisme pelaporan digital dan peningkatan kapasitas pelaksana, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dan keterbukaan informasi (Bening Tirta Wibowo et al., 2026) Artikel tersebut memang berjudul Transparansi dan Pengawasan Keuangan Negara dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diterbitkan pada Jurnal Media Administrasi, Vol. 11 No. 1 Tahun 2026, halaman 64–70. Penelitian lain mengenai good governance dalam MBG juga menunjukkan adanya tantangan terkait pengawasan, efisiensi anggaran, dan potensi moral hazard (Wicaksono, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan MBG, bukan pada pengukuran dampak gizi program. Pendekatan kualitatif berbasis data sekunder dipilih untuk memahami bagaimana prinsip

transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam regulasi, dokumen anggaran, mekanisme pelaporan, sistem pembayaran, dan informasi publik yang tersedia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia berdasarkan data sekunder?
2. Bagaimana mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Program Makan Bergizi Gratis?
3. Apa saja bentuk penguatan transparansi dan akuntabilitas yang telah diterapkan dalam tata kelola keuangan MBG?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan MBG?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan MBG.
2. Menganalisis mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan MBG.
3. Mengidentifikasi instrumen dan kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
4. Mengidentifikasi tantangan tata kelola keuangan dalam pelaksanaan MBG.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi serta informasi keuangan organisasi sektor publik untuk mendukung pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada publik. Berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada keuntungan, organisasi sektor publik menempatkan pelayanan publik dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya masyarakat sebagai tujuan utama (Bastian, 2019).

Dalam konteks MBG, akuntansi sektor publik memiliki peranan penting karena dana yang digunakan bersumber dari keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan negara, pengendalian internal, pelaporan, dan pertanggungjawaban publik (Bening Tirta Wibowo et al., 2026).

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip tata kelola yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai kebijakan, proses, penggunaan sumber daya, dan hasil pelaksanaan program (Arfan Faiz Muhlizi, 2026).

Dalam penelitian ini, transparansi dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu keterbukaan informasi anggaran, keterbukaan realisasi anggaran, akses terhadap informasi program, keterbukaan mekanisme penggunaan dana, keterbukaan informasi penerima manfaat, keterbukaan mekanisme pengadaan, serta ketersediaan informasi pelaporan dan evaluasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban organisasi atau individu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil yang dicapai (Warni et al., 2025).

Dalam konteks MBG, akuntabilitas dapat dilihat dari kejelasan pihak yang bertanggung jawab, kejelasan mekanisme penggunaan dana, dokumentasi dan pelaporan, pengawasan internal dan eksternal, evaluasi program, tindak lanjut hasil pengawasan, serta kemampuan menelusuri penggunaan dana.

Good Governance

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari good governance. Pemerintahan yang baik menuntut pengelolaan sumber daya publik yang terbuka, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks MBG, good governance menjadi relevan karena program melibatkan dana publik dalam jumlah besar dan jaringan pelaksana yang luas (Lendra et al., 2025).

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi memahami dan menginterpretasikan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan MBG berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia (Doyle et al., 2020).

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual melalui interpretasi dokumen, regulasi, laporan pemerintah, dan berbagai sumber informasi yang relevan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder, yang terdiri atas:

Dokumen regulasi Meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
3. Peraturan Badan Gizi Nasional.
4. Keputusan Kepala BGN.
5. Petunjuk teknis penyelenggaraan MBG.
6. Peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pengadaan.

Dokumen pemerintah Meliputi:

1. Nota Keuangan APBN/RAPBN.
2. APBN KiTa.
3. Laporan Kementerian Keuangan.
4. Publikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Publikasi Badan Gizi Nasional.
6. Dokumen dan laporan pemerintah daerah.

Literatur ilmiah Meliputi artikel jurnal nasional dan internasional mengenai:

1. Transparansi sektor publik.
2. Akuntabilitas publik.
3. Pengelolaan keuangan pemerintah.
4. Good governance.

5. Pengawasan keuangan negara.
6. Tata kelola program bantuan/pelayanan publik.
7. Implementasi MBG.

Media dan sumber informasi resmi

Media digunakan sebagai data pendukung untuk memahami dinamika implementasi program dan isu tata kelola, dengan prioritas pada informasi yang dapat diverifikasi melalui dokumen atau pernyataan resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat informasi yang relevan dari dokumen (DalGLISH et al., 2021) Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu regulasi dan kelembagaan, anggaran, mekanisme penyaluran dana, pelaporan, pengawasan, keterbukaan informasi, evaluasi, serta tantangan tata kelola.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, kategorisasi, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi yang tidak relevan dengan transparansi dan akuntabilitas dikeluarkan. Selanjutnya data dikategorikan berdasarkan tema penelitian.

Analisis kemudian dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan normatif yang tercantum dalam regulasi dengan informasi implementasi yang tersedia dalam laporan pemerintah dan sumber sekunder.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari regulasi, dokumen pemerintah, laporan anggaran, publikasi BGN, publikasi Kementerian Keuangan, artikel ilmiah, dan sumber resmi lainnya (Busetto et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kerangka Kelembagaan MBG

Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas MBG telah memperoleh dasar kelembagaan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional. Perpres No. 83 Tahun 2024 menetapkan BGN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas dalam pemenuhan gizi nasional (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, 2024).

Pembentukan lembaga khusus tersebut memiliki implikasi terhadap akuntabilitas karena memberikan kejelasan mengenai institusi yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan program. Penguatan berikutnya ditunjukkan dengan diterbitkannya Perpres No. 115 Tahun 2025. Regulasi ini secara khusus mengatur tata kelola MBG termasuk pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi MBG telah bergerak dari tahap pembentukan program menuju tahap penguatan sistem tata kelola. Hal tersebut penting karena program berskala nasional membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Tanpa pembagian kewenangan dan tanggung jawab, risiko tumpang tindih maupun lemahnya pertanggungjawaban dapat meningkat.

Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran MBG

Salah satu indikator transparansi adalah kemampuan publik untuk memperoleh informasi mengenai jumlah anggaran dan penggunaannya. Dokumen pemerintah menunjukkan bahwa pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk MBG dengan target 17,9 juta penerima manfaat. Untuk 2026, pemerintah merencanakan anggaran MBG melalui kementerian/lembaga sebesar Rp268 triliun. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025) BGN kemudian menjelaskan bahwa pagu anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun, dengan sekitar Rp248 triliun dialokasikan untuk MBG. Selain itu terdapat anggaran untuk sistem dan tata kelola, pemantauan dan pengawasan, serta dukungan manajemen.

Informasi tersebut menunjukkan adanya transparansi pada tingkat makro, terutama mengenai besaran anggaran dan arah penggunaan dana. Namun, transparansi anggaran seharusnya tidak berhenti pada informasi mengenai total anggaran. Dalam perspektif akuntabilitas publik, masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai distribusi anggaran berdasarkan wilayah, realisasi berdasarkan periode, jumlah penerima manfaat, biaya operasional, pengadaan bahan pangan, mekanisme pembayaran kepada mitra, hasil pengawasan, serta koreksi atau tindak lanjut atas temuan. Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah mengembangkan transparansi dari aggregate transparency menuju transactional and outcome transparency.

Digitalisasi sebagai Instrumen Transparansi

Temuan penting lainnya adalah penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan dana MBG. BGN menerapkan virtual account bagi SPPG sebagai mekanisme penyaluran dan pemantauan dana. Penggunaan rekening khusus tersebut dimaksudkan agar dana operasional MBG dapat dipisahkan dan transaksi lebih mudah ditelusuri (Badan Gizi Nasional, 2026).

Dari perspektif akuntansi sektor publik, sistem tersebut dapat memberikan beberapa manfaat:

1. Memperjelas aliran dana.
2. Mengurangi pencampuran dana program dengan dana lain.
3. Memudahkan rekonsiliasi.
4. Meningkatkan kemampuan monitoring.
5. Memperkuat audit trail.
6. Mendukung penyusunan laporan.

Namun, digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan transparansi substantif. Sistem digital perlu didukung dengan:

1. Kualitas data.
2. Integrasi sistem.
3. Standar input.
4. Keamanan data.
5. Pengendalian akses.
6. Audit berkala.
7. Kemampuan menghasilkan informasi publik.

Dengan demikian, digitalisasi merupakan instrumen transparansi, bukan pengganti transparansi.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan MBG

Akuntabilitas pengelolaan keuangan MBG dapat dilihat dari adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana, mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi. Juknis BGN mengenai rekening SPPG dan penggunaan dana MBG menekankan tata kelola penggunaan dana secara sistematis serta pelaporan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Badan Gizi Nasional, 2025) Pada level anggaran, BGN juga menyediakan alokasi khusus untuk pemantauan dan pengawasan. Pada 2026, BGN menyebut anggaran pemantauan dan pengawasan sebesar Rp801 miliar, termasuk kerja sama dengan BPOM untuk kegiatan pengawasan tertentu (Badan Gizi Nasional, 2026) Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah dirancang melalui beberapa lapisan, yaitu:

Perencanaan → Penganggaran → Penyaluran → Pelaksanaan → Pelaporan → Monitoring → Evaluasi → Pengawasan.

Model tersebut pada prinsipnya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan program publik berskala besar. Namun demikian, akuntabilitas substantif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme tersebut. Efektivitas akuntabilitas sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Skala Anggaran dan Risiko Tata Kelola

Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko pengelolaannya. Realisasi MBG sampai 28 Februari 2026 telah mencapai Rp44 triliun dan menjangkau 61,62 juta penerima melalui 25.082 SPPG (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026) Pada Mei 2026, BGN melaporkan sekitar 62,4 juta penerima manfaat dan 29.225 SPPG (Badan Gizi Nasional, 2026).

Besarnya jaringan tersebut berarti pengelolaan keuangan MBG bukan lagi sekadar hubungan antara satu kementerian/lembaga dengan satu penerima manfaat. Program telah membentuk ekosistem yang terdiri atas pemerintah, SPPG, pemasok, UMKM, tenaga kerja, sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kondisi tersebut menciptakan beberapa risiko tata kelola:

1. Ketidaksesuaian data penerima;
2. Perbedaan kapasitas pelaksana;
3. Ketidakkonsistenan pelaporan;
4. Risiko kesalahan administrasi;
5. Risiko pengadaan yang tidak efisien;
6. Risiko konflik kepentingan;
7. Risiko moral hazard;
8. Kesulitan melakukan pengawasan pada wilayah yang luas.

Karena itu, peningkatan skala program harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengendalian internal.

Transparansi dan Akuntabilitas pada Rantai Pasok

MBG mempunyai karakteristik berbeda dibandingkan program bantuan yang hanya melakukan transfer dana. Program ini melibatkan rantai pasok makanan dari pemasok hingga penerima manfaat. Rantai tersebut secara sederhana dapat digambarkan:

Anggaran Negara → BGN → SPPG → Pemasok → Pengadaan Bahan Pangan → Pengolahan → Distribusi → Penerima Manfaat.

Setiap titik memiliki potensi risiko akuntabilitas. Misalnya, pada tahap pengadaan perlu diperhatikan harga, kualitas, kuantitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan. Pada

tahap pengolahan perlu diperhatikan kesesuaian antara jumlah porsi dan jumlah penerima. Sementara itu, pada tahap distribusi diperlukan pencatatan yang memungkinkan adanya rekonsiliasi antara makanan yang diproduksi dan makanan yang diterima. Oleh sebab itu, transparansi keuangan MBG perlu diintegrasikan dengan transparansi rantai pasok.

Tantangan Implementasi Transparansi

Berdasarkan analisis dokumen, terdapat beberapa tantangan.

1. Kompleksitas data.

Jumlah penerima manfaat yang besar dan tersebar menyebabkan kebutuhan terhadap data yang akurat menjadi sangat penting. BGN sendiri menekankan bahwa data penerima manfaat perlu diperbarui secara berkala dan monitoring serta evaluasi dilakukan secara berkelanjutan.

2. Keterbukaan informasi publik.

Penyediaan informasi mengenai total anggaran belum cukup. Informasi idealnya dapat ditelusuri hingga tingkat pelaksanaan dengan tetap memperhatikan perlindungan data yang memang tidak boleh dibuka kepada publik.

3. Konsistensi pelaporan.

Banyaknya SPPG dan pemasok menyebabkan standardisasi format, periode, dan indikator pelaporan menjadi penting.

4. Pengawasan.

Pengawasan harus mampu menjangkau seluruh mata rantai program, bukan hanya memeriksa dokumen administratif.

5. Partisipasi publik.

Masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bagian dari mekanisme kontrol sosial. Pemerintah telah memasukkan komunikasi dan partisipasi publik sebagai salah satu arah kebijakan penguatan MBG.

Masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bagian dari mekanisme kontrol sosial. Pemerintah telah memasukkan komunikasi dan partisipasi publik sebagai salah satu arah kebijakan penguatan MBG (Badan Gizi Nasional, 2026).

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data sekunder, dapat disusun sintesis sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Data Sekunder

Aspek	Temuan	Kondisi
Kelembagaan	BGN sebagai lembaga pengelola utama	Relatif kuat
Regulasi	Perpres 83/2024 dan Perpres 115/2025	Telah tersedia
Informasi anggaran	Pagu dan realisasi dipublikasikan	Tersedia pada level makro
Penyaluran dana	Virtual account SPPG	Menguatkan audit trail
Pelaporan	Mekanisme pelaporan program tersedia	Perlu konsistensi
Pengawasan	Terdapat alokasi dan mekanisme pengawasan	Perlu penguatan
Data penerima	Menggunakan sistem/data pemerintah	Membutuhkan pemutakhiran
Partisipasi publik	Telah menjadi bagian kebijakan	Perlu diperluas
Transparansi substantif	Informasi publik masih perlu semakin detail	Tantangan

Akuntabilitas substantif	Mekanisme tersedia tetapi efektivitas bergantung implementasi	Tantangan
--------------------------	---	-----------

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Bening Tirta Wibowo et al., 2026). yang menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan keuangan negara dalam implementasi MBG perlu didukung oleh pelaporan digital dan penguatan kapasitas pelaksana.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap data sekunder, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Program Makan Bergizi Gratis telah memperoleh fondasi kelembagaan, regulasi, dan sistem pengendalian yang semakin kuat. Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 memberikan kejelasan kelembagaan dalam pemenuhan gizi nasional, sedangkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memperkuat kerangka tata kelola MBG melalui pengaturan mengenai penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan.

Dari sisi transparansi, pemerintah telah menyediakan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran serta mengembangkan sistem digital untuk mendukung pengelolaan dana. Penggunaan virtual account bagi SPPG menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan keterlacakan transaksi.

Dari sisi akuntabilitas, telah tersedia mekanisme pertanggungjawaban melalui pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan. Besarnya alokasi anggaran untuk monitoring dan pengawasan juga menunjukkan adanya perhatian terhadap pengendalian program. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa transparansi formal belum dapat disamakan dengan transparansi substantif. Ketersediaan informasi mengenai total anggaran dan realisasi perlu dilengkapi dengan informasi yang lebih rinci, mudah diakses, dapat ditelusuri, dan mampu menggambarkan hubungan antara input, proses, output, dan outcome program. Demikian pula, keberadaan mekanisme pelaporan belum secara otomatis menjamin akuntabilitas yang efektif. Efektivitas akuntabilitas sangat bergantung pada kualitas data, konsistensi pelaporan, kapasitas pelaksana, pengawasan independen, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

Dengan demikian, tantangan utama pengelolaan keuangan MBG ke depan bukan hanya bagaimana mengalokasikan dan membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah yang digunakan dapat ditelusuri, dijelaskan, diawasi, dan dikaitkan dengan manfaat yang diterima masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

- 1. Memperluas transparansi anggaran**

Pemerintah perlu menyediakan informasi anggaran MBG secara lebih rinci, termasuk alokasi, realisasi, wilayah, jumlah penerima manfaat, dan capaian program.

- 2. Memperkuat integrasi sistem digital**

Sistem keuangan, data penerima manfaat, logistik, dan pelaporan SPPG perlu diintegrasikan agar menghasilkan single source of truth yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi.

- 3. Memperkuat pengawasan independen**

Pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi perlu melibatkan lembaga pengawasan yang relevan serta membuka ruang bagi masyarakat dan akademisi untuk melakukan pemantauan berbasis data publik.

- 4. Meningkatkan kualitas pelaporan SPPG**

Perlu dilakukan standardisasi laporan keuangan dan laporan operasional SPPG agar informasi antarwilayah dapat dibandingkan.

5. Memperkuat mekanisme pengaduan publik

Masyarakat perlu memperoleh kanal pengaduan yang mudah digunakan, terdokumentasi, dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.

6. Meningkatkan transparansi rantai pasok

Informasi mengenai pemasok, proses pengadaan, standar harga, volume pengadaan, serta mekanisme pembayaran perlu dikelola secara transparan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

7. Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan studi kasus pada SPPG tertentu atau melakukan wawancara dengan pengelola SPPG, pemerintah daerah, pemasok, sekolah, dan penerima manfaat sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas di tingkat operasional.

REFERENSI

- Arfan Faiz Muhli. (2026). PENGUATAN AKSES INFORMASI PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. *Https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Ejournal/Index.Php/Jrv/Article/View/137*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/137>
- Badan Gizi Nasional. (2025, September 16). *Petunjuk Teknis Pembuatan Rekening SPPG dan Penggunaan Dana Makan Bergizi Gratis*. <https://Www.Bgn.Go.Id/Juknis/9BZMKr-Petunjuk-Teknis-Pembuatan-Rekening-Sppg-Dan-Penggunaan-Dana-Makan-Bergizi-Gratis>.
- Badan Gizi Nasional. (2026a, January 20). *Kepala BGN: Pagu Anggaran Tahun Ini 95,4 Persennya untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional*. <https://Www.Bgn.Go.Id/News/Siaran-Pers/Kepala-Bgn-Pagu-Anggaran-Tahun-Ini-954-Persennya-Untuk-Program-Pemenuhan-Gizi-Nasiona>.
- Badan Gizi Nasional. (2026b, January 21). *Dana MBG Diawasi Digital Lewat Bank Himbara*. <https://Www.Bgn.Go.Id/News/Berita/Dana-Mbg-Diawasi-Digital-Lewat-Bank-Himbara>.
- Badan Gizi Nasional. (2026c, May 26). *BGN Dukung Langkah Efisiensi Pemerintah, Fokus Perkuat Efektivitas Program MBG 2026*. <https://Www.Bgn.Go.Id/News/Siaran-Pers/Bgn-Dukung-Langkah-Efisiensi-Pemerintah-Fokus-Perkuat-Efektivitas-Program-Mbg-2026>.
- Bastian, I. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In <https://opac.ut.ac.id/detail-opac/index?id=38404> (3rd ed.). Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
- Bening Tirta Wibowo, Friski Ardeka Sahda Rianestu, & Indra Devian Lumban Gaol. (2026). Transparansi dan Pengawasan Keuangan Negara dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *Jurnal Media Administrasi*, 11(1), 64–70. <https://doi.org/10.56444/jma.v11i1.3670>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Dalglish, S. L., Khalid, H., & McMahon, S. A. (2021). Document analysis in health policy research: the READ approach. *Health Policy and Planning*, 35(10), 1424–1431. <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa064>

- Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2020). An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. *Journal of Research in Nursing*, 25(5), 443–455. <https://doi.org/10.1177/1744987119880234>
- Hadinata, M. (2026). Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A Policy, Fiscal, and Political Analysis Grounded in International Evidence. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 65–78. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *NOTA KEUANGAN BESERTA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0d55974c-45ad-48f4-8db3-3804b37d195e/Buku-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2026.pdf>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Perkembangan APBN hingga 28 Februari 2026*. <https://www.kemenkeu.go.id/Informasi-Publik/Publikasi/Siaran-Pers/Kinerja-APBN-Awal-2026-Tetap-Solid>
- Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 937–945. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1252>
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. <https://www.peraturan.go.id/id/perpres-no-115-tahun-2025>
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun Tentang Badan Gizi Nasional*. <https://www.peraturan.go.id/id/perpres-no-83-tahun-2024>
- Rohmah, N. S., Millata, C. I., Perdani, T., Pambudi, D. P., Ramdlani, M. R. F., & Tabrizia, N. S. T. (2026). PROGRAM NASIONAL DALAM SISTEM DESENTRALISASI: DINAMIKA TATA KELOLA KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 156–169. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v10i1.54644>
- Siahay, A. Z. D. (2023). *PUBLIC ACCOUNTING AS A PILLAR OF FINANCIAL GOVERNANCE: A LITERATURE REVIEW ON GOVERNMENT TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY AKUNTANSI PUBLIK SEBAGAI PILAR TATA KELOLA KEUANGAN: KAJIAN LITERATUR TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.15867>
- Warni, A. R., Darlis, E., & Al Azhar A. (2025). MEMBANGUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI KOMPETENSI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN SISTEM PELAPORAN. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 6(2), 272–285. <https://doi.org/10.31258/current.6.2.272-285>
- Wicaksono, E. N. (2026). PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DAN PROBLEMATIKA GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/Article/View/14101>, (13), 113–134. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/14101>